HITUNG VALUSI KERUGIAN MASYARAKAT DI 2022, HASILNYA OMBUDSMAN KALSEL TEMUKAN ANGKA FANTASTIS

Jum'at, 27 Januari 2023 - Ita Wijayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, mengungkapkan hasil perhitungan valuasi kerugian masyarakat dari berbagai Laporan Masyarakat (LM).

Laporan tersebut yakni laporan insiatif, yang ditindaklanjuti pada tahun 2022.

"Dari 236 LM yang kami tangani, 31 diantaranya bisa divaluasi, dengan nilai mencapai Rp.3.482.228.078," ungkap Hadi, Kamis (26/1/2023).

Valuasi kerugian masyarakat ini, lanjutnya, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban kepada publik terhadap penggunaan anggaran negara serta perwujudan kehadiran negara dalam pemenuhan layanan bagi masyarakat.

"Kerugian masyarakat dapat berupa materiil maupun immateriil yang tidak bisa dilepaskan dari timbulnya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan," tuturnya.

Hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa unsur kerugian materiil dan immateriil yang diderita masyarakat dapat tergambar dari pengaduan atau tuntutan yang diajukan.

Selain itu, Hadi juga menambahkan bahwa bentuk penyelamatan kerugian masyarakat yang berhasil dilakukan Ombudsman Kalsel ada beberapa macam.

Ia menyebut, antara lain pengembalian dana, penerimaan langsung atau tidak langsung, serta pelunasan, pelepasan, atau keringanan beban biaya.

Sementara penerima manfaat, yakni dari penyelamatan kerugian tersebut mencakup individual pelapor itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan yang ikut terdampak dari terselenggaranya layanan publik, khususnya setelah adanya tindak lanjut dari Ombudsman Kalsel.

"Valuasi kerugian masyarakat bersumber dari 13 sektor, terbesar dari infrastruktur, kemudian perbankan, kepegawaian, listrik, dan air. Nilainya pun bervariasi, antara Rp200 ribu yang terkecil hingga sekitar Rp2,8 miliar dari sektor yang terbesar," jelasnya.

Pastinya, tidak semua laporan masyarakat bisa divaluasi. Hanya laporan masyarakat yang nyata kerugiannya atau bersifat riil dengan dilengkapi bukti yang jelas dan data pendukung yang valid.

"Itu yang saat ini kami nilai", imbuhnya.

Secara nasional, Ombudsman Republik Indonesia (RI) juga melakukan valuasi kerugian masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI, pada saat Konferensi Pers Daring.

"Total penyelamatan kerugian masyarakat untuk Sektor Perekonomian I tahun 2022 senilai Rp89,8 miliar atau naik 234,45 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp26,85 miliar.

Angka ini khususnya bersumber dari sektor asuransi, perbankan, pengadaan barang dan jasa, perdagangan serta penjaminan," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)